

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang - Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Pemerintah Indonesia. (2021). Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Republik Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Republik Indonesia. (1999). Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (sebelum perubahan).

Republik Indonesia. (2020). Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 147.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Buku:

Ahmad Redi. (2014). Hukum Pertambangan. Jakarta: *Gramata Publishing*.

Arief, Barda Nawawi. (2021). Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Jakarta: Kencana.

- Asshiddiqie, Jimly. (2006). Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI.
- Austin, J. (1832). *The Province of Jurisprudence Determined*. London: John Murray.
- Djaja, Ermansyah. (2019). Hukum Pidana Ekonomi dan Tindak Pidana Korupsi. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hanafi, M. (2015). Sistem Pertanggungjawaban Pidana (Cetakan pertama). Jakarta: Rajawali Pers.
- Hidayat, R., Haris, O. K., Hidayat, S., Handrawan, H., Heryanti, H., & Masulili, M. F. (2022). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penambangan Mineral di Kawasan Hutan Tanpa Izin. *Halu Oleo Legal Research*, 4(2), 261–275.
- HS, Salim. (2013). Hukum Penyelesaian Sengketa Pertambangan di Indonesia. Jakarta: Pustaka Reka Cipta.
- Kelsen, H. (1961). *General Theory of Law and State* (A. Wedberg, Trans.). New York: Russell & Russell.
- Lestari, N. D. (2021). Kepatuhan Hukum Korporasi terhadap Kewajiban Divestasi dalam UU Minerba. *Jurnal Hukum Responsif*, 9(1), 87–99.
- Mahmud Marzuki, Peter. (2010). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana.
- Mertokusumo, Sudikno. (2008). Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar. Yogyakarta: Liberty.

Rajagukguk, Erman. (2007). Hukum Investasi di Indonesia, Anatomi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia.

Salim, R. (1986). Pikiran-Pikiran tentang Pertanggungjawaban Pidana. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Soekanto, Soerjono & Mamudji, Sri. (2001). Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat). Jakarta: Rajawali Pers.

Subedi, Surya P. (2012). International Investment Law: Reconciling Policy and Principle. London: Hart Publishing.

Subekti. (1996). Pokok-Pokok Hukum Perdata. Jakarta: Intermasa.

Supramono, Gatot. (2012). Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia. Jakarta: Rineka Cipta.

Tesis:

Ghinmas Risdiwanto. (2021). Tindak Pidana Izin Pertambangan di Bidang Pertambangan Mineral Batubara (Tesis). Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Jikri Sinurat. (2023). Penegakan Hukum terhadap Pelaku Usaha yang Melakukan Kegiatan Pertambangan tanpa Izin (Studi pada Kepolisian Resor Kota Besar Medan) (Tesis). Medan: Pascasarjana Universitas Medan Area Medan

Jurnal:

- Anas, M. (2022). Pertanggungjawaban Korporasi dalam Kasus Tindak Pidana di Sektor Pertambangan. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, 10(1), 45–56.
- Darongke, B. (2017). Penegakan Hukum Terhadap Pertambangan Tanpa Izin Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. *Jurnal Lex Et Societas*, 5(10).
- Fakrulloh, Zudan Arif. (2005). Penegakan Hukum sebagai Peluang Menciptakan Keadilan. *Jurisprudence*, 2(1).
- Hidayat, R. (2020). Kontrak Karya dan Kedaulatan Negara Atas Sumber Daya Alam. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 17(2), 119–134.
- Kastro, Edy. (2019). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penambangan Tanpa Izin (Illegal Mining) di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Muara Enim. *Artikel Hukum*, No. XL Tahun XXXI.
- Prasetyo, T. A. (2023). Evaluasi Mekanisme Kontrak Karya dalam Investasi Asing di Indonesia. *Jurnal Konstitusi dan Hukum Nasional*, 5(1), 1–15.
- Saleh, R. (1986). *Pikiran-Pikiran tentang Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sari, D. P., & Ramadhan, R. (2021). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Izin (Illegal Mining). *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 2(3), 365–376.
- Sinduwati, Sri. (2024). Peranan UU Minerba sebagai Controls Host State Indonesia terhadap Kedudukan Kontrak Karya PT. Freeport Indonesia

(PTFI) dan Negosiasi Menjadi Jalan Keluar. *Journal Scientific of Mandalika (JSM)*, 5(6), 236-249.

Putusan Pengadilan:

Putusan Pengadilan Negeri Ketapang No. 328/Pid.Sus/2023/PN Ktp.

